



**LAPORAN
KINERJA
LKJ**

TRIBUNAL IV TAHUN 2024

**BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Ahmad Yani No.25 Lumajang

Telp. (0334) 893193/ 881590, Fax. (0334) 893193

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dalam menjalankan segala aktifitasnya agar dapat dinilai kinerjanya dalam upaya menjalankan tugas pokok dan fungsi serta sasar yang harus di capai, Tujuan dan Sasaran guna mewujudkan peningkatan daya saing daerah.

LKj ini diharapkan menjadi masukan bagi perumusan program dan kebijakan strategis tahun berikutnya yang tentunya harus diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Lumajang.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini masih jauh dari sempurna, mengingat latar belakang personil dan pendidikan yang beragam, pengalaman kerja yang masih minim serta kemampuan dalam memahami pedoman penyusunan Laporan Kinerja (LKj) yang masih belum optimal. Oleh sebab itu saran dan masukan dari berbagai pihak guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja dimasa yang akan datang.

Lumajang, Januari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H., M.Hum.
NIP. 19660710 199203 1 007

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	3
D. Dasar Hukum	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Perencanaan Strategis.....	6
B. Rencana Kinerja Tahunan	11
C. Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
B. Realisasi Anggaran.....	23
BAB IV PENUTUP.....	48
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemimpinan yang baik (*good governance*) adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah yang diberikan pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut maka Laporan Kinerja (LKj) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 ini disusun. Laporan Kinerja (LKj) ini menyajikan capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang selama tahun 2023 yang merupakan amanah yang harus dilaksanakan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam urusan kepegawaian di Kabupaten Lumajang. Keberhasilan tentunya bukan hanya keberhasilan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang saja, tetapi juga menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan serta masyarakat secara umum. Oleh karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan strategis dalam mengawal perkembangan dan dinamika pembangunan, pemerintah dan sosial kemasyarakatan secara konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Lumajang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna dan bertanggung-jawab (*akuntabel*). Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023.

Selain itu, penyusunan LKjIP tahun 2023 ini juga merupakan tindak lanjut Pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2020 dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak lanjut dari Tap MPR tersebut adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bupati Lumajang selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten Lumajang berkewajiban mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan termasuk bidang Kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang merupakan unsur pendukung Kepala Daerah dalam bidang kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut dan diwujudkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2023.

Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LKJ Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2023 selain untuk memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah untuk memberikan kontribusi baik pada pemerintah daerah maupun pimpinan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan maupun kinerja organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara jelas kepada publik tentang tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dan merupakan data tertulis agar kinerja instansi pemerintah dapat dinilai dan dapat dipakai sebagai bahan dalam rangka evaluasi dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

C. Gambaran Umum

Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah dan menjabarkan kewenangan daerah atas sumber daya nasional serta untuk menata Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Daerah membentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Dan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang adalah:

1. Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang
 - a. Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
2. Fungsi BKD Kabupaten Lumajang
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
 - c. Pelaksanaan pengadaan pegawai, pensiun, pemberhentian penyusunan data base kepegawaian, pengembangan sistem informasi kepegawaian, pengolahan arsip kepegawaian dan pengembangan Profesi ASN;
 - d. Penyelenggaraan mutasi pegawai, administrasi kenaikan pangkat, penggajian, dan pengembangan karier pegawai.
 - e. Perencanaan dan Penyusunan program pengembangan kompetensi pegawai, perencanaan analisa kebutuhan diklat, pelaksanaan, fasilitasi monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
 - f. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja, pembinaan disiplin, serta pemberian penghargaan pegawai;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

- b. Sekretariat
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Dasar Hukum penetapan SKPD

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, dasar hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang ringkasan atau ikhtisar perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah tahun 2018 - 2023 dan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan atas capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis tahun 2018-2023 adalah merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka hasil yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang selama kurun waktu 2018-2023 adalah **“Meningkatnya Profesionalitas ASN”**. Dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan potensi dan peluang yang dimiliki Badan Kabupaten Lumajang, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran :

1. Visi Kabupaten Lumajang

Pernyataan visi Pembangunan Daerah periode tahun 2018 – 2023 adalah : *“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat ”*

2. Misi Kabupaten Lumajang

Adapun Misi yang mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang tersebut adalah :

Misi ke 1 yaitu : *Pemenuhan Kebutuhan Dasar Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Lebih Sejahtera dan Mandiri.* Maksudnya meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif, dan bermoral melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan.

Misi Ke 2 yaitu : *Mewujudkan Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Berbasis Pada Pertanian, Usaha Mikro, dan Pariwisata.* Maksudnya meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, dan jasa pariwisata,serta usaha pendukung secara berkelanjutan.

Misi Ke 3 yaitu : *Reformasi Birokrasi Yang Efektif, Profesional, Akuntabel, dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar, Dan Bersih (good and clear governance).* Maksudnya mewujudkan pemerintah yang baik, benar, dan bersih melalui

reformasi birokrasi dan pelayanan public yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan, daerah tersebut.

Misi 3 ini mencakup upaya – upaya dalam merumuskan kebijakan strategi bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung dengan technology informasi, Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan public yang professional, aspiratif partisipatif, dan transparan. Termasuk didalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang beorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang professional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*), penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas edan transparansi, serta penciptaan iklim birokrasi yang bebabs dari KKN.

Penataan Kepegawaian atau SDM aparatur diarahkan guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja atau berorientasi kepada sistem merit, yang didukung oleh perencanaan kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, pembinaan karier, dan penilaian berdasar prestasi kerja, diklat berbasis kompetensi, tata nilai, moral, etika dan etos kerja yang baik, dan perlindungan hukum untuk memacu pegawai negeri sipil agar dapat berprestasi tinggi (profesional) dengan memperhatikan perkembangan isu strategis lingkungan organisasi, seperti perubahan kebijakan nasional dalam sistem manajemen pegawai negeri sipil, dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Mengingat pernyataan visi dan misi merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam jangkauan kedepan mengarah pada perspektif, maka dipandang perlu untuk menjabarkan lebih lanjut dalam pernyataan misi yang dijabarkan dalam tujuan agar dapat menjadi pedoman penyelenggaraan program berjangka menengah lima tahunan dalam susunan (Renstra PD) Badan Kepegawaian Daerah. Adapun Misi 3 yang di ampu oleh Badan Kepegawaian Daerah periode tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN , didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat;

- Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai.

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.

a. Tujuan

Tujuan Penjabaran atau Implementasi dari Pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) Tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada Potensi dan Permasalahan serta Isu Bidang Kepegawaian di Kabupaten Lumajang.

Adapun Rumusan Tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, adalah:

- Meningkatnya profesionalitas ASN dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN.

b. Sasaran

Sasaran adalah Penjabaran Tujuan secara Terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dalam jangka waktu Tahunan sampai 5 (lima) Tahun mendatang. Perumusan Sasaran, harus memiliki Kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan Isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measureable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic), tepat waktu (time bound). Sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023, adalah :

1) Meningkatnya Profesionalitas ASN

Dengan 4 sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN;
- Meningkatnya Kompetensi ASN;
- Meningkatnya Kinerja ASN;
- Meningkatnya Disiplin ASN.

2) Dengan 4 Indikator Sasaran sebagai berikut :

- Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN;
- Indeks Kompetensi ASN;
- Indeks Kinerja ASN;
- Indeks Disiplin ASN.

c. Kebijakan

Kebijakan untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan Pengembangan Kompetensi Aparatur, Penilaian Kinerja dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan pembinaan aparatur;
 - b) Meningkatkan kualifikasi aparatur.
- 2) Mengoptimalkan Penilaian Kinerja Aparatur dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan penghargaan dan sanksi;
 - b) Meningkatkan pelaksanaan regulasi tentang sanksi aparatur.

d. Program

Adapun program yang melekat dengan kebutuhan dan kemampuan penganggaran meliputi :

- 1) Program Kepegawaian Daerah, terdiri dari kegiatan :
 - a) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, terdiri dari sub kegiatan:
 1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 2. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
 3. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN;
 4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.
 - b) Mutasi dan Promosi ASN, terdiri dari sub kegiatan:
 1. Pengelolaan Mutasi ASN;
 2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
 3. Pengelolaan Promosi ASN.
 - c) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terdiri dari sub kegiatan:
 1. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
 2. Pembinaan Disiplin ASN;
 3. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari kegiatan:

- a) Pengembangan Kompetensi Teknis, terdiri dari sub kegiatan;
 - 1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
 - 2. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
- b) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1. Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga;
 - 2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Selain program dan kegiatan utama diatas, terdapat juga Program Penunjang Urusan Pemerintahan yang mendukung kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, dengan kegiatan antara lain:

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Administrasi Kepegawaian, Terdiri dari sub kegiatan:
 - 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- c) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Rencana Kerja Tahunanan

Uraian prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran jangka pendek (tahunan). Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis seperti pencapaian target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2023. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesiifik dan terukur.

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Profesionalitas ASN	-	Indeks Profesionalitas ASN	66.75%
	1.Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN	Indeks kualifikasi pendidikan ASN	13.00%
	2.Meningkatnya Kompetensi ASN	Indeks Kompetensi ASN	22.76%
	3.Meningkatnya Kinerja ASN	Indeks Kinerja ASN	26.00%
	4.Meningkatnya Disiplin ASN	Indeks Disiplin ASN	4.99%

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN

Formula Indikator Kinerja :

$$\frac{\{(Jumlah\ ASN\ yang\ memiliki\ ijazah\ S3\ X\ 25) + (Jumlah\ ASN\ yang\ memiliki\ ijazah\ S2\ X\ 20) + ((Jumlah\ ASN\ yang\ memiliki\ ijazah\ S1 + D4) X\ 15) + (Jumlah\ ASN\ yang\ memiliki\ ijazah\ D3\ X\ 10) + ((Jumlah\ ASN\ yang\ memiliki\ ijazah\ D2 + D1 + SMA) X\ 5) + ((Jumlah\ ASN\ yang\ memiliki\ ijazah\ SMP + SD) X\ 1)\}}{Jumlah\ ASN} \times 100$$

Alasan :Semakin Tinggi pendidikan ASN maka diharapkan semakin tinggi pula profesionalitasnya.

Sumber Data :Bidang Mutasi dan Promosi dan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

2. Meningkatnya Kinerja ASN

Formula Indikator Kinerja :

$$\frac{\{(Jumlah\ ASN\ dengan\ nilai\ SKP\ sangat\ baik\ X\ 30) + (Jumlah\ ASN\ dengan\ nilai\ SKP\ baik\ X\ 25) + (Jumlah\ ASN\ dengan\ nilai\ SKP\ cukup\ X\ 15) + (Jumlah\ ASN\ dengan\ nilai\ SKP\ sedang\ X\ 5) + (Jumlah\ ASN\ dengan\ nilai\ SKP\ kurang\ X\ 1)\}}{Jumlah\ ASN} \times 100$$

Alasan :Semakin tinggi nilai SKP ASN maka akan semakin Meningkatkan Kinerja ASN.

Sumber Data :Bidang PKAP

3. Meningkatnya Disiplin ASN

Formula Indikator Kinerja :

$$\frac{\{(Jumlah\ ASN\ yang\ Tidak\ Pernah\ mendapatkan\ HD\ X\ 5) + (Jumlah\ ASN\ yang\ mendapatkan\ HD\ Ringan\ X\ 3) + (Jumlah\ ASN\ yang\ mendapatkan\ HD\ Sedang\ X\ 2) + (Jumlah\ ASN\ yang\ mendapatkan\ HD\ Berat\ X\ 1)\}}{Jumlah\ ASN} \times 100$$

Alasan :Semakin kecil ASN yang menerima hukuman Disiplin maka semakin Meningkatkan Disiplin ASN

Sumber Data :Bidang PKAP

4. Meningkatnya Kompetensi ASN

Formula Indikator Kinerja :

$$\frac{\{(Jumlah\ ASN\ yang\ mengikuti\ Diklat\ PIM\ X\ 15) + (Jumlah\ ASN\ yang\ mengikuti\ Diklat\ Fungsional\ X\ 15) + (Jumlah\ ASN\ JPT, JA, JP, JF\ yang\ mengikuti\ Diklat\ Teknis\ 20\ JP\ X\ 15) + (Jumlah\ ASN\ yang\ mengikuti\ Diklat\ Lainnya\ X\ 15)\}}{Jumlah\ ASN} \times 100$$

ASN Jabatan Pelaksana yang mengikuti Diklat Teknis 20 JP X 22.5) + (Jumlah ASN JPT, JA, JP, JF yang mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya X 10) + (Jumlah ASN Jabatan Pelaksana yang mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya X 17.5)}

Jumlah ASN

Alasan : Dengan bertambahnya kemampuan maka semakin Meningkatnya Kompetensi ASN.

Sumber Data : Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Pada Tahun Anggaran 2023 Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang melaksanakan Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang terdiri atas :

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	
			K	Rp
1	2	3	4	
I	KEPEGAWAIAN			
A.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase Pelayanan Kepegawaian	90 %	314.256.760
		Persentase ASN yang Memiliki Pendidikan sesuai Kualifikasi	95 %	135.868.000
		Persentase ASN yang memiliki kinerja baik	95 %	55.642.000
		Persentase ASN yang tidak melakukan indisipliner	99 %	45.330.000
1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pengadaan ASN yang dibutuhkan	83 %	142.391.150
		Persentase ASN yang menerima SK pensiun	85 %	21.600.000
		Persentase Sistem Informasi yang dikelola	86 %	107.065.610
		Persentase ASN yang terfasilitasi Dokumen Kepegawaian	95 %	43.200.000
a.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	-
b.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	345 Dokumen	142.391.150
c.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	574 Dokumen	21.600.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	
			4	
1	2	3	K	Rp
d.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	4 Lemb aga	43.200.000
e.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	11 Doku men	86.665.610
f.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Doku men	20.400.000
2.	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Dokumen Penataan Karier sesuai dengan Persyaratan Jabatan	88 %	128.943.000
		Persentase Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100 %	6.925.000
a.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	30 Doku men	90.183.000
b.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Doku men	6.925.000
c.	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Doku men	38.760.000
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Arsip dokumen SKP	55 %	50.350.000
		Persentase penyelesaian dokumen Disiplin ASN	91 %	45.330.000
		Persentase ASN yang mendapatkan penghargaan	81 %	5.292.000
a.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	289 Doku 2 men	50.350.000
b.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	500 Oran g	5.292.000
c.	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	112 Oran g	44.050.000
d.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	60 Lapo ran	1.280.000
II	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Pengembangan SDM	80 %	704.749.750

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	
			K	Rp
1	SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	5,54 %	161.656.750
a.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	9 Oran g	139.231.000
b.	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	80 Doku men	22.425.750
2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Struktural yang memiliki kompetensi dan sertifikasi	80 %	543.093.000
a.	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	5 Doku em	77.000.000
b.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	80 Lapor an	466.093.000
III	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH			

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	
			K	Rp
1	2	3	4	
C.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	5.926.358.457
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	2.706.000
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Doku men	1.596.000
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Doku men	-
c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Doku men	-
d.	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Doku men	-
e.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Lapor an	-
f.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lapor an	1.110.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.849.396.120
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang /Bulan	4.811.314.120
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Doku men	35.526.000
c.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Doku men	-

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	
			K	Rp
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.556.000
e.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	-
f.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	-
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100 %	242.322.937
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	-
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	116.720.387
c.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.223.250
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.600.000
e.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5.846.300
f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.250.000
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	104.683.000
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100 %	50.000.000
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	
			K	Rp
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	644.310.000
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.926.000
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	322.700.000
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	319.684.000
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100 %	137.623.400
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	102.373.400
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	35.250.000
Program			Anggaran	
1.	PROGRAM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		Rp	551.096.760,00
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Rp	704.749.750,00
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH		Rp	5.926.358.457,00
Jumlah :			Rp	7.182.204.967,00

C. Perjanjian Kinerja Tahunan

Tujuan perjanjian kinerja antara lain ialah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi mencapai tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah dibuat untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 menjadi tumpuan bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lumajang untuk mewujudkan kinerja *output* ataupun *outcome* yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Perjanjian Kinerja ini merupakan janji kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN	13.00%
2. Meningkatnya Kompetensi ASN	Indeks Kompetensi ASN	22.76%
3. Meningkatnya Kinerja ASN	Indeks Kinerja ASN	26.00%
4. Meningkatnya Disiplin ASN	Indeks Disiplin ASN	4.99%

Program	Anggaran	Ket.
1. PROGRAM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 551.096.760,00	APBD
2. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 704.749.750,00	APBD
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Rp 5.926.358.457,00	APBD
Jumlah :	Rp 7.182.204.967,00	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Pencapaian kinerja tahun 2023 sudah mengacu dan sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Capaian kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian kinerja pada tahun 2023 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang menguraikan tentang capaian sasaran strategis yang tercermin dalam indikatornya, strategi yang telah ditetapkan, maupun kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran serta rencana solusinya, adapun analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Capaian Kinerja Tribulan IV Tahun 2023

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Kinerja		
				Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6=5/4	
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN	-	Indeks Profesionalitas ASN	66.7 5	66.90	100.22 %
		1. Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN	Indeks kualifikasi pendidikan ASN	13.0 0	12.38	95.23%
		2. Meningkatnya Kinerja ASN	Indeks Kinerja ASN	26.0 0	25.44	97.85%
		3. Meningkatnya Disiplin ASN	Indeks Disiplin ASN	4.99	4.99	100%
		4. Meningkatnya Kompetensi ASN	Indeks Kompetensi ASN	22.7 6	24.09	105.84 %

Adapun indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN :

$$\frac{\{(Jumlah\ ASN\ yang\ memiliki\ ijazah\ S3\ X\ 25) + (Jumlah\ ASN\ yang\ memiliki\ ijazah\ S2\ X\ 20) + ((Jumlah\ ASN\ yang\ memiliki\ ijazah\ S1 + D4) X\ 15) + (Jumlah\ ASN\ yang\ memiliki\ ijazah\ D3\ X\ 10) + ((Jumlah\ ASN\ yang\ memiliki\ ijazah\ D2 + D1 + SMA) X\ 5) + ((Jumlah\ ASN\ yang\ memiliki\ ijazah\ SMP + SD) X\ 1)\}}{Jumlah\ ASN} X\ 100$$

$$= \frac{\{(0 \times 25) + (235 \times 20) + ((3363+141) \times 15) + (666 \times 10) + ((55 + 8+ 729) \times 5) + (241 + 70) \times 1\}}{5508} \times 100$$

$$= \mathbf{12.38}$$

IP 1 : Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN telah mencapai diatas target yang telah di tentukan yakni target 13.00 dengan realisasi 12.38 hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni banyaknya pegawai yang mengikuti penyesuaian ijazah dan ujian dinas.

2. Indeks Kinerja ASN :

$$\frac{\{(Jumlah\ ASN\ dengan\ nilai\ SKP\ sangat\ baik\ \times\ 30) + (Jumlah\ ASN\ dengan\ nilai\ SKP\ baik\ \times\ 25) + (Jumlah\ ASN\ dengan\ nilai\ SKP\ cukup\ \times\ 15) + (Jumlah\ ASN\ dengan\ nilai\ SKP\ sedang\ \times\ 5) \times\ 100 + (Jumlah\ ASN\ dengan\ nilai\ SKP\ kurang\ \times\ 1)\}}{Jumlah\ ASN}$$

$$= \frac{\{(546 \times 30) + (5290 \times 25) + (5 \times 15) + (2 \times 5) + (2 \times 1)\}}{5845} \times 100$$

$$= \mathbf{25.44}$$

IP 2 : Indikator Kompetensi ASN telah mencapai diatas target yang telah di tentukan yakni target 26.00 dengan realisasi 25.44 hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni adanya peningkatan kinerja dari ASN sesuai dengan perjanjian kinerja dan adanya pembinaan SKP pada instansi ditempat kerja.

3. Indeks Disiplin ASN

$$\frac{\{(Jumlah\ ASN\ yang\ Tidak\ Pernah\ mendapatkan\ HD\ \times\ 5) + (Jumlah\ ASN\ yang\ mendapatkan\ HD\ Ringan\ \times\ 3) + (Jumlah\ ASN\ yang\ mendapatkan\ HD\ Sedang\ \times\ 2) + (Jumlah\ ASN\ yang\ X\ 100\ mendapatkan\ HD\ Berat\ \times\ 1)\}}{Jumlah\ ASN}$$

$$= \frac{\{(5494 \times 5) + (5 \times 3) + (2 \times 2) + (7 \times 1)\}}{5508} \times 100$$

$$= \mathbf{4.99}$$

IP 3 : Indikator Disiplin ASN telah mencapai diatas target yang telah di tentukan yakni target 4.99 dengan realisasi 4.99 hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni adanya penurunan ASN yang melanggar peraturan perundang – undangan semakin kecil.

4. Indeks Kompetensi ASN :

$$\frac{\{(Jumlah\ ASN\ yang\ mengikuti\ Diklat\ PIM\ \times\ 15) + (Jumlah\ ASN\ yang\ mengikuti\ Diklat\ Fungsional\ \times\ 15) + (Jumlah\ ASN\ JPT, \times\ 100}$$

JA, JP, JF yang mengikuti Diklat Teknis 20 JP X 15) + (Jumlah ASN Jabatan Pelaksana yang mengikuti Diklat Teknis 20 JP X 22.5) + (Jumlah ASN JPT, JA, JP, JF yang mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya X 10) + (Jumlah ASN Jabatan Pelaksana yang mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya X 17.5)}

Jumlah ASN

$$= \frac{\{(298 \times 15) + (9 \times 15) + (3060 \times 15) + (894 \times 22.5) + (4229 \times 10) + (1132 \times 17.5)\}}{5508} \times 100$$

$$= \mathbf{24.09}$$

IP 4 : Indikator Kompetensi ASN telah mencapai diatas target yang telah di tentukan yakni target 22.76 dengan realisasi 24.09 hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni banyaknya pegawai yang mengikuti diklat mandiri secara daring.

Adapun Capaian Kinerja terhadap IKU Bupati dengan Rumus Indeks Profesionalitas ASN ini disajikan dalam rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{IP = \sum Ipi}$$

$$= IP1 + IP2 + IP3 + IP4$$

$$= 12.38 + 25.44 + 4.99 + 29.04$$

$$= \mathbf{66.90}$$

Dari data table diatas dapat dilihat Capaian Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2023 triwulan IV mencapai 66.90. Adapun hambatan, kendala dan upaya yang dilakukan antara lain:

Hambatan dan Kendala OPD dalam Pencapaian IKU Bupati :

1. Kualifikasi pendidikan yang dimiliki ASN masih perlu ditingkatkan;
2. Kompetensi yang dimiliki ASN masih perlu ditingkatkan;
3. Iklim kompetisi Kinerja masih perlu ditingkatkan;
4. Kewajiban ASN dalam menjaga kedisiplinan masih perlu ditingkatkan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala / strategi yang dilakukan untuk mencapai target kinerja :

1. Melaksanakan ujian dinas, ujian KPPI, tugas belajar, izin belajar serta pengakuan ijazah;
2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat II, III, IV, Teknis, Fungsional serta Sertifikasi secara daring;
3. Melaksanakan penilaian kinerja melalui SKP secara berjenjang dari atasan hingga bawahan;

4. Menerapkan dengan aplikasi SIPERLU yang didukung dengan pemberian punishment yang jelas bagi yang melanggar disiplin akan dikenai hukuman disiplin berat, sedang atau ringan.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bentuk tanggungjawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah anggaran yang merupakan tanggungjawab Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang untuk mengelolanya secara transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1. PROGRAM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	551.096.760	532.945.599	96.71%
2. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	704.749.750	658.141.086	93.39%
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	5.926.358.457	5.898.679.150	99.53%
JUMLAH	7.182.204.967	7.089.765.835	98.71%

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 Triwulan IV pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disampaikan pada table dibawah ini :

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
				K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	URUSAN															
I		KEPEGAWAIAN														
	PROGRAM															
A.	Meningkatnya Kualitas Kepegawaian Daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase Pelayanan Kepegawaian	90 %	314,256,760	%	94,12	34.950.000	94 %	60.792.800	94 %	70.700.000	94 %	56.543.200	94 %	308,565,999
			Persentase ASN yang Memiliki Pendidikan sesuai Kualifikasi	95 %	135,868,000	%	67	39.183.000	68 %	11.085.000	68 %	32.340.000	68 %	41.229.000	67 %	123,837,000
			Persentase ASN yang memiliki kinerja baik	95 %	55,642,000	%	90,12	19.034.000	100 %	11.990.600	87 %	10.800.000	106 %	13.468.000	96 %	55,292,600
			Persentase ASN yang tidak melakukan indisipliner	99 %	45,330,000	%	96,64	12.550.000	97 %	11.700.000	99 %	10.500.000	99,75 %	10.500.000	98 %	45,250,000
					551,096,760			105.717.000		95.568.400		124.340.000		121.740.200	96,3%	532,945,599
	KEGIATAN															

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
						I		II		III		IV			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pengadaan ASN yang dibutuhkan	83 %	142.39 1.150	- %	13.65 0.000	93,64 %	39.49 2.800	- %	49.40 0.000	- %	35.24 3.200	94 %	137,78 6,000
			Persentase ASN yang menerima SK pensiun	85 %	21.600. 000	21 %	5.400. 000	24 %	5.400. 000	20 %	5.400. 000	37 %	5.400. 000	102 %	21,600, 000
			Persentase Sistem Informasi yang dikelola	86 %	20.400. 000	27 %	5.100. 000	27 %	5.100. 000	30 %	5.100. 000	2 %	5.100. 000	86 %	105,97 9,999
			Persentase ASN yang terfasilitasi Dokumen Kepegawaian	95 %	43.200. 000	32 %	10.80 0.000	30 %	10.80 0.000	20 %	10.80 0.000	18 %	10.80 0.000	100 %	43,200, 000
				227.59 1.150		34.95 0.000		60.79 2.800		70.70 0.000		56.54 3.200	-	308,56 5,999	
	SUB. KEGIATAN														
a	Meningkatnya Fasilitas Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	2 Dokumen	-	- Dokumen	-	Dokumen	-	2 Dokumen	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			
						I		II		III		IV					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pengadaan ASN	Pelaksanaan Pengadaan ASN														
b	Meningkatn ya Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	34 Do 5 ku me n	142.39 1.150	- Do ku me n	13.65 0.000	32 Do ku me n	39.49 2.800	- Do ku me n	49.40 0.000	Do ku me n	35.24 3.200	322	Do ku me n	137.78 6.000	
c	Meningkatn ya Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	57 Do 4 ku me n	21.600. 000	12 Do ku me n	5.400. 000	13 Do ku me n	5.400. 000	11 Do ku me n	5.400. 000	21 Do ku me n	5.400. 000	585	Do ku me n	21.600. 000	
d	Meningkatn ya Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	4 Le mb aga	43.200. 000	3 Do ku me n	10.80 0.000	Do ku me n	10.80 0.000	3 Do ku me n	10.80 0.000	4 Do ku me n	10.80 0.000	4	Do ku me n	43.200. 000	
e	Menigkatny a Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaia n	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaia n	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	11 Do ku me n	-	3 Do ku me n	-	2 Do ku me n	-	3 Do ku me n	-	2 Do ku me n	85.57 9.999	10	Do ku me n	85.579. 999	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023								
						I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
f.	Meningkatnya Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12	Do ku me n 20.400.000	3	Do ku me n 5.100.000	3	Do ku me n 5.100.000	3	Do ku me n 5.100.000	3	Do ku me n 5.100.000	12	Do ku me n 20.400.000							
	KEGIATAN																					
2.	Meningkatnya Penataan Mutasi dan Promosi ASN	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Dokumen Penataan Karier sesuai dengan Persyaratan Jabatan	88	%	128.94	97	%	32.25	96	%	11.08	95	%	32.34	97	%	41.22	96	%	116.91	2.000
			Persentase Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10	%	6.925.000	-	%	6.925.000	99	%	-	-	%	-	99	%	-	99	%	Do ku me n 6.925.000	
						135.86			39.18			11.08			32.34			41.22		-	123.83	7.000
	SUB. KEGIATAN																					
a.	Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Mutasi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi,	30	Do ku me n 90.183.000	16	Do ku me n 26.858.000	5	Do ku me n 5.685.000	5	Do ku me n 26.940.000	4	Do ku me n 22.624.000	30	Do ku me n 82.107.000							

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
						I		II		III		IV				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah													
b	Meningkatnya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Do ku me n	6.925.0 00	- Do ku me n	6.925. 000	1 Do ku me n	-	- Do ku me n	-	1 Do ku me n	-	2 Do ku me n	6.925.0 00	
c	Meningkatnya Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Do ku me n	38.760. 000	1 Do ku me n	5.400. 000	1 Do ku me n	5.400. 000	1 Do ku me n	5.400. 000	1 Do ku me n	18.60 5.000	1 Do ku me n	34.805. 000	
KEGIATAN																
4	Meningkatnya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Arsip dokumen SKP	55 %	50.350. 000	89 %	17.05 0.000	3 %	10.80 0.000	6 %	10.80 0.000	19 %	11.70 0.000	29 %	50.350. 000	
			Persentase penyelesaian dokumen Disiplin ASN	91 %	45.330. 000	10 %	12.55 0.000	10 %	11.70 0.000	10 %	10.50 0.000	83 %	10.50 0.000	96 %	45.250. 000	
			Persentase ASN yang mendapatkan penghargaan	81 %	5.292.0 00	90 %	1.984. 000	- %	1.190. 600	10 %	-	96 %	1.768. 000	71 %	4.942.6 00	
					100.97 2.000		31.58 4.000		23.69 0.600		21.30 0.000			3.2 93	100.54 2.600	
SUB. KEGIATAN																

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
						I		II		III		IV				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
a	Meningkatnya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	28 Do 92 ku me n	50.350. 000	1.805 Do ku me n	17.050.000	527 Do ku me n	10.800.000	325 Do ku me n	10.800.000	636 Do ku me n	11.700.000	3.293	Do ku me n	50.350. 000
b	Menigkatnya Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50 Or 0 an g	5.292.000	423 Or an g	1.984.000	- Or an g	1.190.600	- Or an g	-	232 Or an g	1.768.000	655	Or ang	4.942.600
c	Menigkatnya Pembinaan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	11 Or 2 an g	44.050.000	106 Or an g	12.550.000	- Or an g	10.500.000	- Or an g	10.500.000	0 Or an g	10.500.000	106	Or ang	44.050.000
d	Menigkatnya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	60 La por an	1.280.000	5 La por an	-	2 La por an	1.200.000	4 La por an	-	3 La por an	-	14	La por an	1.200.000
URUSAN																
II		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
						I		II		III		IV				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM															93,39%
B	Meningkat nya Pengemban gan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembanga n SDM	80 %	704.74 9.750	54 %	99.41 9.000	- %	31.50 0.000	- %	162.1 27.00 0	15 %	365.0 95.08 6	69	%	658.14 1.086
	KEGIATAN															
1	Meningkatn ya Pengemban gan Kompetensi Teknis	Pengemban gan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembanga n Kompetensi Teknis dan Fungsional	5,5 % 4	161.65 6.750	0,1 % 2	52.82 0.000	1,6 % 7	15.30 0.000	- %	19.30 8.500	1,7 % 6	68.35 4.124	3,55	%	155.78 2.624
	SUB. KEGIATAN															
a	Meningkatn ya Penyelengga raan Pengemban gan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Adminstras i Penyelengga ra Urusan Pemerintah	Penyelengga raan Pengemban gan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Adminstras i Penyelengga ra Urusan Pemerintah	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembanga n Kompetensi	9 Or an g	139.23 1.000	7 Or an g	52.82 0.000	- Or an g	15.30 0.000	- Or an g	17.48 8.500	2 Or an g	49.08 8.300	9	Or ang	134.69 6.800

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				
						I		II		III		IV						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	ra Urusan Pemerintah an Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah an Umum	an Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah an Umum																
b	Meningkatn ya Pembinaan, Pengoordin asian, Fasilitasi, Pemantaua n, Evaluasi, dan Pelaporan Pengemban gan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Adminstras i Penyelengga ra Urusan	Pembinaan, Pengoordin asian, Fasilitasi, Pemantaua n, Evaluasi, dan Pelaporan Pengemban gan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan adminstras i Penyelengga ra Urusan Pemerintah an	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasi an, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembanga n Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	80 Do ku me n	22.425. 750	-	Do ku me n	-	96 Do ku me n	-	-	Do ku me n	1.820. 000	95 Do ku me n	19.26 5.824	191	Do ku me n	21.085. 824

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
						I		II		III		IV				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintah an Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah an Umum	Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah an Umum	Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													
	KEGIATAN															
2	Meningkatn ya Sertifikasi, Kelembagaa n, Pengemban gan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sertifikasi, Kelembagaa n, Pengemban gan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Struktural yang memiliki kompetensi dan sertifikasi	80 %	543.09 3.000	69 %	46.59 9.000	71 %	16.20 0.000	69 %	142.8 18.50 0	69 %	296.7 40.96 2	69	%	502.35 8.462
	SUB. KEGIATAN															
a	Meningkatn ya Pelaksanaa n Kerjasama Antar Lembaga	Pelaksanaa n Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	5 Do ku em	77.000. 000	1 Do ku em	14.00 0.000	- Do ku em	-	1 Do ku em	-	2 Do ku em	60.00 0.000	4	Do ku em	74.000. 000

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
						I		II		III		IV			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
b	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	80 Laporan	466.093.000	16 Laporan	32.599.000	9 Laporan	16.200.000	56 Laporan	142.818.500	44 Laporan	236.740.962	125 Laporan	428.358.462
	URUSAN														
III		URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH													
	PROGRAM														
C	Meningkatnya fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	5.926.358.457	29 %	1.335.376.878	22 %	1.905.601.349	20 %	1.321.649.616	23 %	1.336.051.307	94,63 %	5.898.679.150

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
						I		II		III		IV			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		N /KOTA													
		KEGIATAN													
1	Meningkatnya Fasilitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	10 %	2.706.000	40 %	2.706.000	20 %	-	10 %	-	30 %	-	100 %	2.706.000
		SUB. KEGIATAN													
a	Meningkatnya Fasilitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.596.000	1 Dokumen	1.596.000	1 Dokumen	-	Dokumen		Dokumen	-	2 Dokumen	1.596.000
b	Meningkatnya Fasilitas Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	Dokumen		Dokumen	-	1 Dokumen	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
						I		II		III		IV			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
c.	Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	Dokumen -	-	Dokumen -	-	Dokumen -	-	Dokumen -	-	Dokumen -	-	Dokumen -
d.	Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	Dokumen -	-	Dokumen -	-	Dokumen -	-	Dokumen -	-	Dokumen -	-	Dokumen -
e.	Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	Laporan -	1	Dokumen -	-	Dokumen -	-	Dokumen -	-	Dokumen -	1	Dokumen -

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
						I		II		III		IV				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
f	Meningkatn ya Fasilitasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 La por an	1.110.0 00	1 La por an	1.110. 000	1 La por an	-	1 La por an		2 La por an	-	5 La por an	1.110.0 00	
	KEGIATAN															
2	Meningkatn ya Fasilitasi Administras i Keuangan Perangkat Daerah	Administras i Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administراس i Keuangan Perangkat Daerah	10 % 0	4.849.3 96.120	30, 43 %	1.052 .303. 809	21, 74 %	1.641. 793.4 00	26, 09 %	1.067. 418.9 44	21, 74 %	1.070 .227. 485	100 %	4.831. 743.63 8	
	SUB. KEGIATAN															
a	Meningkatn ya Fasilitasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Or an g / Bul an	4.811.3 14.120	51 Or an g / Bul an	1.040. 276.8 09	51 Or an g / Bul an	1.632. 280.4 00	47 Or an g / Bul an	1.057. 905.9 44	47 Or an g / Bul an	1.063. 257.4 85	47 Or ang / Bul an	4.793.7 20.638	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
						I		II		III		IV			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
b	Meningkatnya Fasilitas Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	Dokumen 35.526.000	1	Dokumen 9.513.000	-	Dokumen 9.513.000	1	Dokumen 9.513.000	-	Dokumen 6.970.000	2	Dokumen 35.509.000
c	Meningkatnya Fasilitas Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	Dokumen -	-	Dokumen -	-	Dokumen -	-	Dokumen -	-	Dokumen -	-	Dokumen -
d	Meningkatnya Fasilitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan 2.556.000	1	Laporan 2.514.000	-	Laporan -	-	Laporan -	-	Laporan -	1	Laporan 2.514.000

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			
						I		II		III		IV					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
e.	Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	Laporan -	Laporan -	Laporan -	Laporan -	Laporan -	Laporan -	Laporan -	Laporan -	-	Laporan -	-		
f.	Meningkatnya Fasilitasi Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	Dokumen -	Dokumen -	Dokumen -	1	Dokumen -	Dokumen -	Dokumen -	Dokumen -	1	Dokumen -	-		
	KEGIATAN																
6.	Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100	% 242.32	40	% 86.85 5.000	20	% 74.22	74.22	20	% 49.98	49.98	20	% 28.95 5.140	100	% 240.01 9.605

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
						I		II		III		IV				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	SUB. KEGIATAN															
a	Meningkatn ya Fasilitasi Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Pa ket	-	- Pa ket	-	- Pa ket	-	- Pa ket	-	- Pa ket	-	-	Pa ket	-
b	Meningkatn ya Fasilitasi Jenis Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Pa ket	116.72 0.387	2 Pa ket	60.18 2.500	1 Pa ket	45.95 0.600	1 Pa ket	1.798. 400	1 Pa ket	7.517. 700	5	Pa ket	115.44 9.200
c	Meningkatn ya Fasilitasi Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pa ket	2.223.2 50	1 Pa ket	242.0 00	1 Pa ket	312.0 00	1 Pa ket	234.5 00	1 Pa ket	1.434. 000	1	Pa ket	2.222.5 00
d	Meningkatn ya Fasilitasi Jenis Penyediaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	3 Do ku me n	3.600.0 00	3 Do ku me n	290.0 00	3 Do ku me n	930.0 00	3 Do ku me n	1.080. 000	3 Do ku me n	640.0 00	12	Do ku me n	2.940.0 00

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			
						I		II		III		IV					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Perundang- undangan	Perundang- Undangan yang Disediakan														
e	Meningkatn ya Fasilitasi Penyediaan Bahan/Mat erial	Penyediaan Bahan/Mat erial	Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan	1 Pa ket	5.846.3 00	1 Pa ket	1.200. 000	- Pa ket	1.200. 000	- Pa ket	2.550. 000	Pa ket	850.0 00	1	Pa ket	5.800.0 00	
f	Meningkatn ya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 La por an	9.250.0 00	3 La por an	920.0 00	3 La por an	3.850. 000	3 La por an	3.000. 000	3 La por an	1.450. 000	12	La por an	9.220.0 00	
g	Meningkatn ya Fasilitasi Penyelenga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengga an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 La por an	104.68 3.000	3 La por an	24.02 0.500	3 La por an	21.98 4.965	3 La por an	41.31 9.000	3 La por an	17.06 3.440	3	La por an	104.38 7.905	
	KEGIATAN																
7	Meningkatn ya Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	10 % 0	50.000. 000	%	-	%	-	%	-	%	-	49.99 0.000	49.99 0.000	%	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
						I		II		III		IV				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintah Daerah															
	SUB. KEGIATAN															
a	Meningkatnya Fasilitas Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	49.990.000	49.990.000	Unit	
	KEGIATAN															
8	Meningkatnya Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	10 %	644.310.000	25 %	162.639.069	25 %	138.129.784	25 %	159.895.972	25 %	177.343.182	100 %	638.008.007	
	SUB. KEGIATAN															
a	Meningkatnya Fasilitas Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.926.000	1 Laporan	293.000	1 Laporan	298.000	1 Laporan	197.500	1 Laporan	205.000	1 Laporan	993.500	
b	Meningkatnya Fasilitas Penyediaan Jasa Komunikasi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	4 Laporan	322.700.000	4 Laporan	84.198.431	4 Laporan	57.493.851	4 Laporan	79.948.980	4 Laporan	96.445.628	4 Laporan	318.086.890	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
						I		II		III		IV			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	, Sumber Daya Air dan Listrik	dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan												
c	Meningkatn ya Fasilitasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 La por an 319.68 4.000	3 La por an 78.14 7.638	3 La por an 80.33 7.933	3 La por an 79.74 9.492	3 La por an 80.69 2.554	3 La por an 318.92 7.617						
	KEGIATAN														
9	Meningkatn ya Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	10 % 0 137.62 3.400	11 % 30.87 3.000	24 % 51.45 0.600	20 % 44.35 2.800	19 % 9.535 .500	73 % 136.21 1.900						
	SUB. KEGIATAN														
a	Meningkatn ya Fasilitasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	31 Uni t 102.37 3.400	5 Uni t 25.97 3.000	15 Uni t 39.42 5.600	7 Uni t 27.92 6.800	4 Uni t 7.735. 500	31 Uni t 101.06 0.900						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
						I		II		III		IV			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	an, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
b	Meningkatn ya Fasilitasi Jenis Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Uni t	35.250. 000	7 Uni t	4.900. 000	12 Uni t	12.02 5.000	15 Uni t	16.42 6.000	10 Uni t	1.800. 000	44 Uni t	35.151. 000

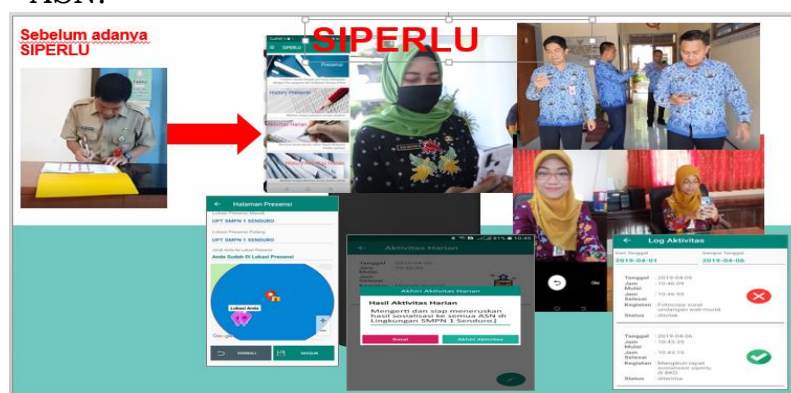
Berdasarkan pada tabel diatas, total belanja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2023 sebesar Rp. 7.182.204.967,00 dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2023 triwulan IV sebesar Rp. 67.089.765.835,00 Melihat tingkat capaian penyerapan anggaran secara keseluruhan mengindikasikan bahwa sumber daya keuangan telah digunakan secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis, sesuai yang telah ditargetkan dalam Renstra tahun 2018-2023 dan ditetapkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang melakukan beberapa inovasi dalam upaya meningkatkan Profesionalitas ASN Kabupaten Lumajang melalui inovasi sebagai berikut :

1. SIPERLU (Sistem Informasi Presensi Lumajang)

Sejauh ini SIPERLU sudah tahap penerapan sejak tahun 2018 hingga saat ini, adapun jenis inovasi berupa digital dan merupakan inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan dan diterapkan di Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan Profesionalitas ASN. Latar belakang adanya SIPERLU adalah adanya presensi manual yang dilakukan ASN melalui pengisian kolom presensi dengan tanda tangan. Melalui presensi manual tersebut, ditengarai adanya manipulasi data/ pengkondisian presensi ASN yang tidak sesuai dengan kehadiran ASN yang sebenarnya sehingga data yang dilaporkan kurang akurat dan penerapan presensi manual tersebut tidak mendukung upaya peningkatan disiplin ASN sesuai Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Ketentuan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Melihat kondisi tersebut, Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Lumajang melakukan inovasi Sistem Presensi secara elektronik yang diberi nama SIPERLU. SIPERLU adalah Sistem Informasi berbasis aplikasi android. Aplikasi tersebut sangat mudah digunakan melalui gawai masing-masing ASN dimana ASN dapat melakukan presensi ketika posisinya sudah sesuai lokai OPD yang sudah ditentukan dan sesuai jam kerja yang berlaku. Masing-masing ASN dapat mengisi aktifitas harian yang dilakukan dan langsung bisa dipantau oleh atasan langsungnya. Setelah diberlakukan SIPERLU, data presensi dan data akyifitas harian ASN yang tersaji bisa dijamin keakuratannya karena ASN yang melakukan presensi dan yang tidak melakukan presensi kehadirannya benar-benar dapat dibedakan datanya secara nyata. Sehingga semakin mudah dalam melakukan control pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat kehadiran ASN.



1. SIPERLU

memberikan fasilitas presensi yang canggih dan dapat diakses di smartphone masing-masing pegawai dan dapat di download di playstore, dan mengenai informasi-informasi penting lainnya dapat diakses di website resmi BKD Lumajang www.bkd.lumajangkab.go.id



TUJUAN	MANFAAT	HASIL
<ul style="list-style-type: none"> Memudahkan PNS dalam mengisi presensi kehadiran Meningkatkan kedisiplinan PNS dalam menaati ketentuan jam kerja sesuai peraturan yang berlaku Meningkatkan kinerja PNS Memudahkan pimpinan dalam melakukan monitoring kehadiran PNS pada unit kerjanya Memudahkan proses rekapitulasi kehadiran PNS Mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik Sebagai dasar pemberian Tambahan Penerimaan PNS 	<ul style="list-style-type: none"> Setelah diberlakukan SIPERLU, data presensi dan data aktivitas harian ASN yang tersaji bisa dijamin keakuratannya karena ASN yang melakukan presensi dan yang tidak melakukan presensi kehadiran benar-benar dapat dibedakan datanya secara nyata. Sehingga semakin mudah dalam melakukan kontrol pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat kehadiran ASN. Tingkat Kedisiplinan PNS meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> Mampu meningkatkan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi




2. SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian)

Sejauh ini SIMAK sudah tahap penerapan sejak tahun 2017 hingga saat ini, adapun jenis inovasi berupa digital dan merupakan inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan dan diterapkan di Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan keakuratan data kepegawaian. Latar belakang adanya inovasi SIMAK adalah data masih dihimpun secara manual sehingga sering terjadi perbedaan data yang ada di Badan Kepegawaian Daerah dengan data yang ada di masing-masing OPD.

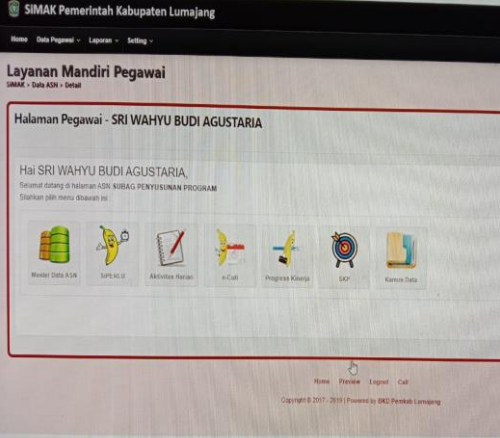
Melihat kondisi tersebut, Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Lumajang melakukan Inovasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian). SIMAK adalah Sistem Informasi berbasis web yang sangat mudah digunakan masing-masing ASN. ASN dapat melakukan update data secara mandiri dimanapun dan kapanpun. Setelah diberlakukan SIMAK, data kepegawaian dan dokumen kepegawaian digital masing-masing menjadi lebih update. Sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang memiliki data dan dokumen digital masing-masing ASN yang akurat dan update. Data tersebut juga terintegrasi dan digunakan untuk mendapatkan layanan kepegawaian lainnya. Untuk mewujudkan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi dan paperless.

2. SIMAK

Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian, sebagai pusat data kepegawaian dan dokumen kepegawaian digital masing-masing menjadi lebih update. Sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang memiliki data dan dokumen digital masing-masing ASN yang akurat dan update. Data tersebut juga terintegrasi dan digunakan untuk mendapatkan layanan kepegawaian lainnya. Untuk mewujudkan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi dan paperless.



TUJUAN	MANFAAT	TUJUAN
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian ini dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen kepegawaian dan pengelolaan informasi kepegawaian yang lengkap dan akurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung manajemen ASN yang rasional berbasis sistem merit; Mewujudkan database kepegawaian yang lengkap, akurat, terbaru (up to date) dan terintegrasi; Menyediakan bahan analisa kepegawaian; Menyediakan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi; 	<ul style="list-style-type: none"> Mampu meningkatkan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi



3. E-Berkala

E-berkala merupakan modul aplikasi yang terintegrasi dengan SIMAK BKD Lumajang, digunakan untuk mempermudah, mempercepat proses validasi dan verifikasi penerbitan surat kenaikan gaji berkala.

3. e-BERKALA

Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala dapat dilakukan tepat waktu, yaitu dalam kurun 3 (tiga) bulan sebelum TMT, Surat Kenaikan gaji berkala yang baru sudah diterbitkan) tanpa perlu menunggu usulan dari OPD

TUJUAN :

- ✓ Memudahkan verifikasi dan validasi data sebelum penerbitan surat kenaikan gaji berkala baru,
- ✓ Penerbitan Surat kenaikan gaji berkala tepat waktu sebelum TMT Berkala,

MANFAAT :

- ✓ Mempercepat proses verifikasi dan validasi surat kenaikan gaji berkala;
- ✓ Penerbitan Surat kenaikan gaji berkala tepat waktu sebelum TMT Berkala.

HASIL :

- ✓ Dengan adanya e-berkala, proses verifikasi dan validasi penerbitan surat kenaikan gaji berkala yang awalnya dilakukan oleh 10 orang kini dapat dilakukan oleh 2 orang saja;
- ✓ Surat kenaikan gaji berkala dapat diterbitkan tepat waktu sebelum TMT berkala baru.

Surat Kenaikan Gaji Berkala yang sudah diterbitkan dan dapat diunduh disimak pegawai yang bersangkutan

4. E-Pangkat

E-Pangkat, pengusulan kenaikan pangkat dari OPD sejak kenaikan pangkat periode 1 April 2019 sudah paperless menggunakan E-Pangkat. E pangkat merupakan modul aplikasi yang terintegrasi dengan SIMAK BKD Lumajang, digunakan untuk mempermudah, mempercepat dalam proses pengajuan usul kenaikan pangkat secara paperless. Admin OPD dapat dengan segera mengetahui status usulan, serta melengkapi kekurangan berkas bila ada.

4. e-PANGKAT

E-Pangkat merupakan modul aplikasi yang terintegrasi dengan SIMAK BKD Lumajang, digunakan untuk mempermudah, mempercepat dalam proses pengajuan usul kenaikan pangkat secara paperless. Admin OPD dapat dengan segera mengetahui status usulan, serta melengkapi kekurangan berkas bila ada.

TUJUAN

- ✓ Pengajuan usul kenaikan pangkat secara elektronik dan paperless,
- ✓ mempercepat proses penusulan dan validasi berkas kenaikan pangkat,
- ✓ data kepegawaian di Kabupaten Lumajang terupdate secara realtime.

MANFAAT :

- ✓ Mempercepat proses verifikasi berkas oleh admin pangkat,
- ✓ Pengelola kepegawaian OPD dapat mengetahui status usulan dan kekurangan berkas yang harus dilengkapi segera melalui e-pangkat,
- ✓ Data kepegawaian pada SIMAK BKD Lumajang terupdate secara realtime setelah penerbitan dan penyerahan SK Pangkat selesai.

HASIL

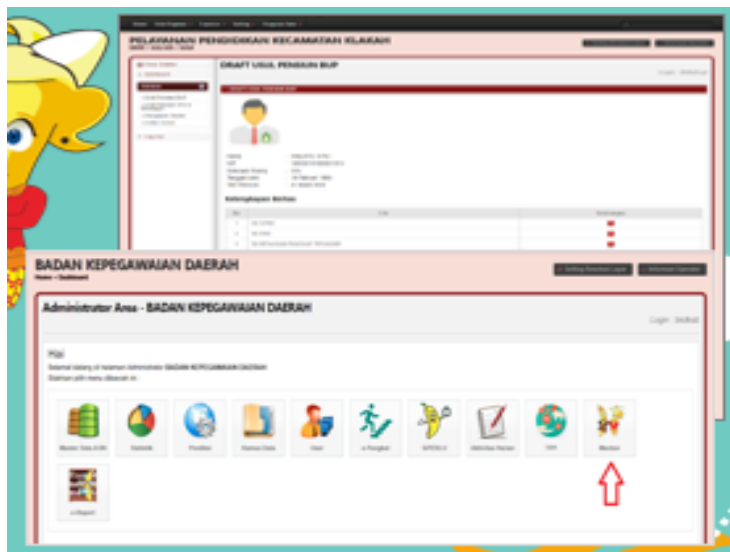
Dengan adanya e-pangkat, proses pengajuan usulan maupun berkas kelengkapan yang diajukan sudah paperless, admin opd dapat mengetahui status usulan secara realtime dan segera melengkapi berkas kekurangan bila ada. Karena e-pangkat merupakan modul yang terintegrasi dengan SIMAK BKD Lumajang, maka data kepegawaian di Kabupaten Lumajang, khususnya pangkat dapat terupdate secara realtime begitu SK Pangkat telah diterbitkan dan dibagikan.

5. SIMANTUN TANDUK (Sistem Informasi Manajemen Pensiun Terintegrasi Dengan Administrasi Penduduk)

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, khususnya Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian membuat inovasi berupa aplikasi E-Pensiun (Mantun) dalam menangani pensiun kemudian terus disempurnakan menjadi SIMANTUN TANDUK (Sistem Informasi

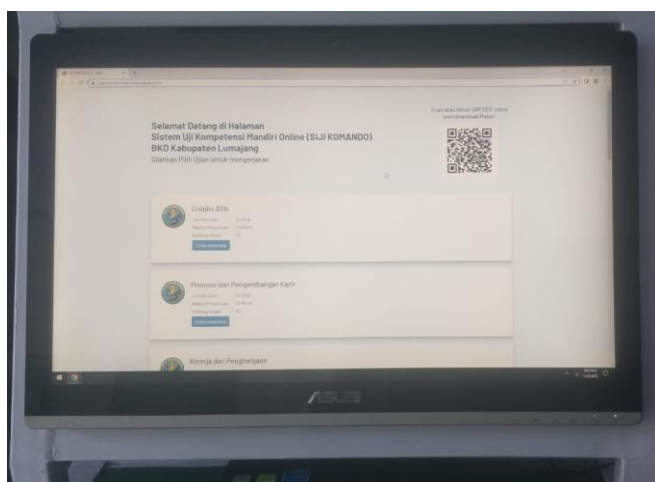
Manajemen Pensiun Terintegrasi Dengan Administrasi Penduduk) Sehingga Pegawai Negeri Sipil tidak lagi datang ke Badan Kepegawaian Daerah membawa berkas fisik sebagai syarat pemberkasan. Indikator keberhasilan dari inovasi ini yaitu PNS dapat melihat progres pengerjaan SK sampai diterimanya SK tersebut oleh yang bersangkutan.

Penanganan pensiun yang semula menggunakan berkas fisik secara manual, kini telah menggunakan berkas digital yang diunggah melalui akun simak admin kepegawaian. PNS tadinya tidak mengetahui progres pengerjaan SK Pensiun, sekarang dapat melihat progres pengerjaannya



6. SISTEM UJI KOMPETENSI MANDIRI ONLINE (SIJI KOMANDO)

SIJI KOMANDO digagas untuk merespon permasalahan yang ada terhadap kurangnya pengembangan kompetensi ASN di Pemerintah Kabupaten Luamajang dan dilator belakanginya terbatasnya anggaran pengembangan kompetensi juga keengganan dari masing-masing ASN untuk meningkatkan kompetensinya. Untuk ini perlu dibangun suatu sistem yang sederhana dapat digunakan untuk banyak orang dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja, baik melauli computer maupun ponsel pribadi (online).



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 tribulan IV merupakan pertanggungjawaban manajerial, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dibebankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang kepada Badan Kepegawaian Daerah seperti yang telah diamanatkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

Laporan Kinerja ini memuat hasil yang telah dicapai selama kurun waktu 3 bulan yaitu pada tahun 2023 tribulan IV yang berisi keberhasilan dan kegagalan, masalah, usulan pemecahan dan saran.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan ke depan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

Lumajang, Januari 2024



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H., M.Hum.
NIP. 19660710 199203 1 007

Lampiran

Penghargaan yang diperoleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang

